BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7./Kep. 69 –Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) berkas

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gurbernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah

untuk menyusun Resntra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Unadang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

4. Undang-Unadang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Pearturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep. 25-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pendidikan;
2. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 050/ 509/ Bappelitbangda tanggal 31 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait
   1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
   2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya.
   3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggar-an daerah dan urusan pemerintahan yang

menjadi tugas pokok dan fungsinya.

c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
e. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
f. melaksanakan forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
g. menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
h. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon:
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1135–Disdik/2023
TANGGAL : 27 November 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

I	Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan
II	Ketua Tim	:	Sekretaris Dinas Pendidikan
III	Sekretaris I	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
IV	Kelompok Kerja		
	Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait		
	Koordinator	:	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
	Anggota	:	1. Kasi Sarana, Prasarana data Sekolah Dasar 2. Kasi Sarana, Prasarana data Sekolah Menengah Pertama 3. Subkoor Pengelolaan Keungan dan Aset
			4. Subkoor Kurikulum Sekolah Dasar
			5. Kasi Sarana, Prasarana data Pendidikan Anak Usia Dini
	Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan		
	Koordinator	:	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	:	1. Pelaksana pada Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 5. Pelaksana pada Bidang Pendidikan Non Formal

	Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah		
	Koordinator	:	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal 3. Subkoor Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar 5. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

BUPATI CIREBON,

IMRON

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran guna mengembangkan potensi individu memiliki nilai spiritual, kepribadiaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Definisi Pendidikan di atas memiliki makna *outcome* dari pendidikan mewujudkan **derajat dan pendidikan masyarakat** sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman berlandaskan pada nilai-nilai spiritual. Kondisi tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap proses pembangunan daerah salah satunya meningkatnya kesejahteraan.

Bentuk kongkrit kesejahteraan dapat terlihat dari kondisi kehidupan yang layak didapatkan melalui pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak dapat terwujud tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan sangat penting bahkan menjadi salah satu urusan pemerintah yang bersifat wajib. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga

Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan perlu ditunjang dengan sistem perencanaan yang baik agar hasil penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat diukur kebermanfaatannya bagi pembangunan daerah. Salah satu bentuk perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen yang memuat perencanaan program dan kegiatan dalam waktu lima tahun. Renstra Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon memuat perencanaan kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pendidikan selama dua tahun. Di dalam Renstra memuat sasaran, tujuan, *outcome* yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pendidikan selama dua tahun ke depan dengan mengakomodir berbagai kepentingan. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dijadikan bahan acuan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pendidikan tahunan serta bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan tahunan maupun dua tahunan. Implikasi lainnya adalah Renstra dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penentuan anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pendidikan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan berdasarkan fungsi dan tugas setiap perangkat daerah.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025- 2026 sebagai bentuk operasional strategi dan kebijakan pemerintah daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan

landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen- komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E.5);

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri, D.11).
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra 2025-2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah memberikan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang telah disepakati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu:

1.3.1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang pendidikan.

1.3.2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan serta para pihak

terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pendidikan di Jawa Barat.

1.3.3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja serta penyusunan anggaran setiap tahunnya berkenaan dengan program dan kegiatan Pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan. Sistematika Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, berisi gambaran pelayanan Dinas Pendidikan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan yang menjelaskan mengenai permasalahan pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaahan visi, misi, dan program gubernur disertai faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati; selain itu dijelaskan pula mengenai keterkaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian, Renstra Dinsas Pendidikan Kabupaten Cirebon; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2025 - 2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2025 - 2026..

Bab VII, menjelaskan secara detail mengenai indikator kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1); bahwa Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon digambarkan dalam struktur sebagai berikut:

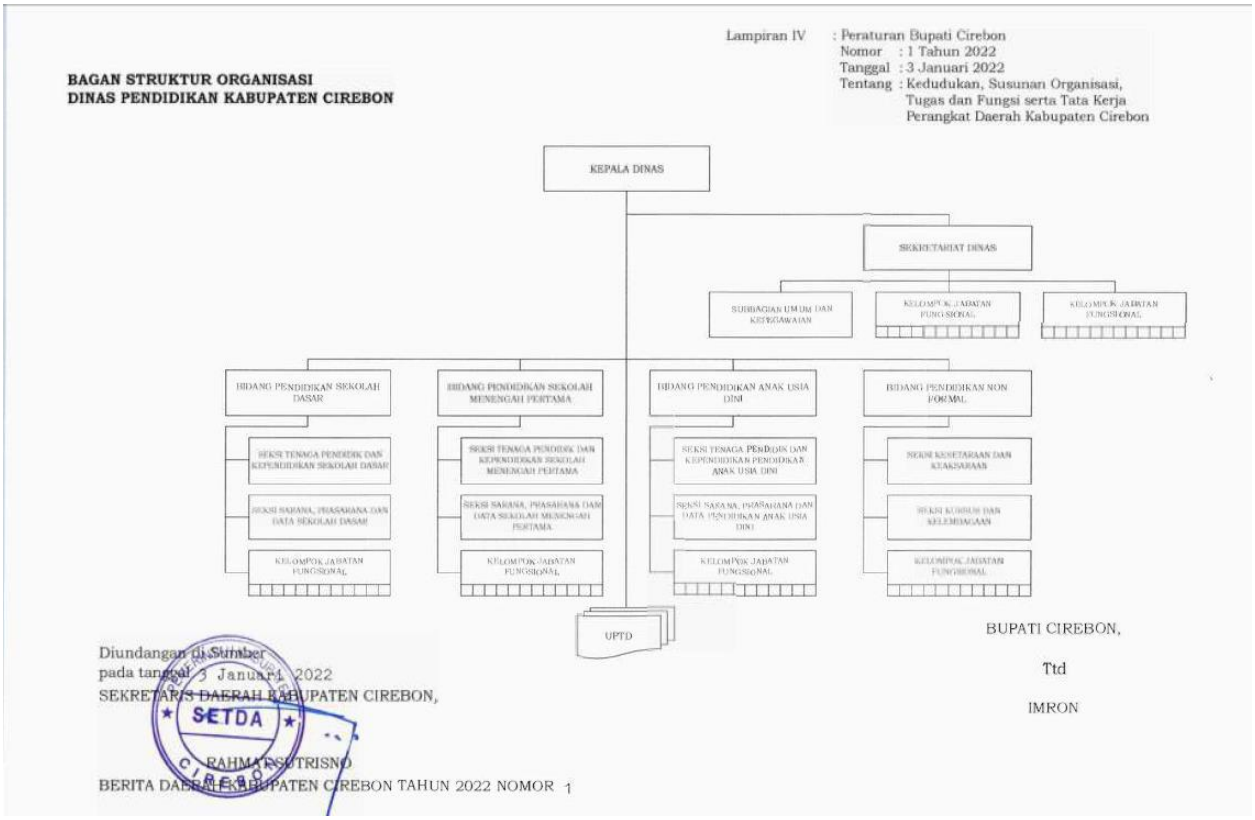

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5) maka secara rinci tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pendidikan;
b. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
c. pengelolaan pendidikan;
d. pengembangan kurikulum;
e. pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pengendalian perizinan pendidikan;

g. pengembangan bahasa dan sastra;
h. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan 1 (satu) subbagian, dan 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:
Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Sekretariat Dinas, terdiri dari :

a. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Sub Koordinator Keuangan dan Aset; dan
b. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data sekolah dasar.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar serta sarana prasarana dan data sekolah dasar;
d. pelayanan informasi publik di daerah bidang pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar, sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
e. pengolahan data analisis bidang pendidikan sekolah dasar yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar, sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
g. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
h. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar (SD);
i. p engendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar;
j. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Dasar;
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar; dan
1 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Dasar yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Dasar.

Sub Koordinator dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

4.1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar.

(3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
c. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
d. pengusulan dan pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar;
e. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan;
f. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
i.

4.2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan

mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data sekolah dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data sekolah dasar;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan sekolah dasar;
f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah dasar;
h. pengelolaan data dan profil pendidikan sekolah dasar;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Dasar; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan sekolah menengah pertama yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah menengah

pertama;

c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama;
d. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
g. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
h. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
i. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
j. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

5.1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau,

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama,

(3) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
b penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
c. penyusunan rencana kebutuhan dan mendata tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan sekolah menengah pertama;
d. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
e. pengusulan atau pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama;
f. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan;
g. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama.

(3) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data sekolah menengah pertama;
c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan

sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan sekolah menengah pertama;

f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

h. pengelolaan data dan profil pendidikan sekolah menengah pertama;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Sekolah Menengah Pertama; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang meliputi urusan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sarana Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini;
d. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;
e. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana, prasarana dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
g. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
h. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,

6.1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

(1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
(2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan» memantau» mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini.
(3) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini;
    c. penyusunan rencana kebutuhan dan mendata tenaga pendidik dan kependidikan pada PAUD;
    d. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
    e. pengusulan dan pemberian rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
    f. pengendalian data sistem informasi manajemen tenaga pendidik dan

kependidikan;

g. pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

6.2. Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini

(1) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(2) Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini.

(3) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana, prasarana dan data pendidikan anak usia dini;

c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;

d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;

e. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan pendidikan anak usia dini;

f. pengoordinasian pencatatan dan pelaporan (pena

g. pengelolaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;

h. pengelolaan data dan profil pendidikan anak usia dini;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana dan Data Pendidikan Anak Usia Dini; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang

Pendidikan Non Formal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan non formal yang meliputi kurikulum, kesetaraan dan keaksaraan serta kursus dan kelembagaan pendidikan non formal.

Bidang Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pendidikan Non Formal;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan non formal;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
d. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
e. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Non Formal;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan data di bidang pendidikan Non Formal;
g. pelayanan informasi publik di daerah bidang Pendidikan Non Formal yang meliputi Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
h. pengolahan data analisis bidang Pendidikan Non Formal yang meliputi Kurikulum, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Kelembagaan;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Non Formal; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Non Formal, terdapat Kelompok Substansi Kurikulum Pendidikan Non Formal yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kurikulum Pendidikan Non Formal.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

7.1. Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh Kepala Seksi

Kesetaraan dan Keaksaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal;

(2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

(3) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan dan keaksaraan;
c. pelaksanaan pembinaan dan penetapan kesetaraan dan keaksaraan;
d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SM A dan Keaksaraan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7.2. Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal.

(3) Seksi Kursus dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kursus dan Kelembagaan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kursus dan kelembagaan;

c. penyusunan dan pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan non formal;
d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal;
e. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
f. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
g. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
h. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
i. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebanyak 272 orang, yaitu:

1). Kepala Dinas 1 orang

2). Sekretariat terdiri dari Sekertaris 1 orang yang membawahi 1 kepala sub bagian dan 2 Kepala Sub Koordinator dan 102 pegawai.

3). Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

4). Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

5). Bidang Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

6). Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari 4 aparatur termasuk Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

7). Rumpun Jabatan Fungsional terdiri :

a. Pengawas Sekolah (TK, SD dan SMP) berjumlah 28 aparatur.

b. Penilik (PAUD, Kesetaran dan Kursus) berjumlah 7 aparatur.

c. Analis Kepegawaian berjumlah 3 aparatur

d. Perencanan berjumlah 2 aparatur

e. Pengembang Tekhnologi Pembelajaran 4 aparatur

8). Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan 40 Wilayah Kecamatan dengan jumlah pegawai sebanyak …….. orang aparatur.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan mengambarkan sejauh mana capaian pelayanan khususnya dalam penyelenggarakan kegiatan pendidikan. Pendidikan termasuk kedalam urusan wajib bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, artinya bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sejalan dengan amanat dari UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa layanan pendidikan harus terjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan menyasar pada capaian pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke belakang (visi dan tujuan pembangunan pendidikan) menggunakan sebanyak 27 Indikator. 10 Indikator secara langsung menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Penentuan 28 Indikator tersebut bersumber pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal serta Indikator Kunci berkaitan dengan pendidikan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara umum ouput kemajuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tampak dari Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Indeks Pendidikan pada tahun 2019 sebesar 6.62 mengalami pertumbuhan positif hingga di tahun 2023 sebesar 10.03 Rata-rata pertumbuhan Indeks Pendidikan setiap tahunnya sebesar 0.15%. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan nilai target yang telah ditentukan maka indeks pendidikan belum mencapai target yang diharapkan.

Dilihat berdasarkan komposisi Indeks Pendidikan sendiri yakni Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah keduanya mengalami trend kenaikan namun tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sayangnya angka RLS tersebut masih berada dibawah angka target yang telah

ditetapkan. Begitu juga dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) belum mencapai target yang telah ditetapkan capaian pada Tahun 2019 sebesar 12.24 Tahun, dan sampai dengan tahun tahun 2023 Angka HLS sebesar 12.41 tahun. Angka RLS pada tahun 2019 sebesar 6.71 Tahun , Tahun 2020 6,92 tahun, pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon sebesar 7.10 tahun dan pada tahun 2022 sebesar 7.40. dan Tahun 2023 RLS Kabupaten Cirebon sebesar 7.64 Tahun. Artinya bahwa kemampuan masyarakat yang telah berusia 25 tahun keatas hanya dapat mengakses pendidikan hingga tingkat SMP kelas 1 akan naik ke Kelas 2 Sekolah Menengah Pertama. Tentunya capaian tersebut belum dapat mencapai pendidikan wajib 12 tahun.

INDIKATOR KINERJA KUNCI / SPM Standar Nasional		**REALISASI CAPAIAN**				
		Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
1.1.1.1.2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	**1.1.1.1.2.0. Angka Rata-rata Lama Sekolah**	**6.71**	**6.92**	**7.10**	**7.40**	**7.64**
	1.1.1.1.3.0. Angka Harapan Lama Sekolah	**12.24**	**12.25**	**12.27**	**12.28**	**12.41**

Ada beberapa faktor keberhasilan serta ketidak berhasilan dari kedua indikator tersebut. Pertama keberhasilan faktor Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat dari aspek aksesbilitas yang akan dibahas lebih lanjut. Tentunya aksesbilitas pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan penduduk terhadap menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya.

Gambaran umum aksesibilitas pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam pembangunan di bidang pendidikan. APK/APM lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar diartikan sebagai rasio penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA terhadap kelompok usia (7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun), tanpa memperhatikan usia bagi penduduk yang sedang menempuh pendidikan selama dalam tingkat sekolah. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan sederajat di Kabupaten Cirebon dimulai tahun 2019 yakni 116,52% Rasio APK pada tingkat SD melebihi batas maksimum 100%, artinya banyak siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar tidak sesuai umur, lebih muda atau lebih tua. Pada tahun 2023 APK SD mengalami penurunan menjadi sebesar 102,28%, artinya bahwa anak yang sekolah pada jenjang SD yang masih belum sesuai umur mengalami penurunan. Fenomena peningkatan APK ditandai biasanya banyak orang tua yang menyekolahkan anak pada jenjang SD lebih awal. Jumlah tersebut terkoreksi seiring dengan berkembangnya fasilitas layanan Pendidikan Anak UsiaDini.

Pada APK jenjang pendidikan Menengah Pertama dan Atas, keduanya mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 naik sebesar 34,81% mesikpun mengalami fluktuatif pada tahun-tahun tertentu. APK pendidikan Menengah Pertama pada Tahun 2019 sebesar 122.27% selama 4 tahun hingga tahun 2023 sebesar 102.72% mengalami penurunan sebesar 19.55 poin, sedangkan pada jenjang Pendidikan Menengah Atas mengalami rata-rata pertumbuhan selama 4 tahun dari Tahun 2019 sebesar 95.86% hingga 2023 menjadi 128,13% ada kenaikan sebesar 32.37 poin. Jenjang pendidikan menengah atas mengalami fluktuatif yang cukup tinggi.

2. Angka Partisipasi Murni

Perolehan Angka Partisipasi Murni (APM) pada seluruh jenjang pendidikan

tidak berbeda jauh dengan Perolehan Angka Partisipasi Murni (APK) di Kabupaten Cirebon. Angka APM tentunya memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan angka APK. Hal ini disebabkan karena APM hanya menghitung jumlah penduduk usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan jenjang Dasar / Menengah hingga dengan kelompok umur usia sekolah yang sesuai. Angka Partisipasi Murni pendidikan Sekolah Dasar mengalami rata- rata penurunan menuju angka ideal 100% dari tahun 2019 sampai tahun 2023 sebesar 6.42%, Pada tahun 2019 APM jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebesar 103.32% masih berada diatas 100%, dan pada tahun 2023 sebesar 96.90% artinya bahwa dari seluruh usia anak (7-12 tahun) belum seluruhnya sedang menempuh pendidikan sekolah dasar. Angka APM pada jenjang pendidikan Menengah-Atas lebih rendah dibandingkan dengan APM Pendidikan Menengah Pertama. APM jenjang pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2019 sebesar 97.88% dan 2023 sebesar 95.01% dan Pendidikan Menegah Atas pada tahun 2019 sebesar 66.95% dan pada tahun 2023 sebesar 90.01%, keduanya belum mencapai angka Ideal 100%.

Tinggi rendahnya APK serta APM pada suatu jenjang pendidikan tertentu tidak lepas dari faktor Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah serta Angka Kelulusan. Lebih lanjut akan dijelaskans sebagai berikut:

1. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan siswa yang tidak tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang yang bersangkutan dikalikan 100%. Diharapkan bagi seluruh daerah memiliki Angka Putus Sekolah yang rendah dikarenakan berdampak terhadap indikator pendidikan lainya. Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar, mengalami penurunan angka putus sekolah, selama 5 tahun ke belakang rata-rata sebesar 0.02%. di tahun 2019 Angka Putus Sekolah pendidikan Sekolah Dasar sebesar 0.10% menjadi 0.02 di tahun 2023.

Berbeda dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengalami penurunan Angka Putus Sekolah tahun 2019-2023. Rata-rata penurunan di tahun 2019-203 sebesar 0.05%. Angka Putus Sekolah jenjang

pendidikan Menengah Atas pada tahun 2019 sebesar 0.21% sampai dengan 2020 sebesar 0.15% ada penurunan sebesar 0.06%. Angka Putus pada tahun 2022 sebesar 0.26% sampai dengan 2023 sebesar 0.11%, mengalami penurunan 0.25%. Meskipun.

2 Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutan Sekolah yakni rasio perbandingan jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Indikator tersebut memiliki kaitan terhadap indikator pembangunan pendidikan lainya. Pada tahun awal 2019, Angka Melanjutkan Sekolah SD ke jenjang SMP sebesar 110.66 %. Di tahun 2023 Angka Melanjutkan Sekolah SD ke jenjang SMP sebesar 100.73%. Angka tersebut mengalami fluktuatif, tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6.57%, tahun selanjutnya 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 3.91% dan dari tahun 2021 hingga 2023 mengalam penurunan sebesar 5.50%.

Begitu juga dengan Angka Melanjutkan Sekolah pada jenjang sekolah SMP ke jenjang SMA/sederajat mengalami penurunan, pada tahun awal 2019 angka melanjutkan sebesar 118.20%, pada tahun 2020 117,07% pada tahun 2021 ada penurunan menjadi sebesar 99,17%, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 17,90%. Hal ini karena pada masa itu terjadi musibah nasional Vandemi Covid 2020. Pada tahun 2021 angka melanjutkan SMP ke SMA/sederajat 99,17% hingga tahun 2023 masih mengalami penurunan rata-rata 4,99%. 2023 sebesar 89,19%, dengan rician sebagaiman pada bagan daftar dibawah :

3. Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan menunjukan rasio jumlah siswa yang mampu menyelesaikan pada jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh siswa pada jenjang pendidikan bersangkutan. Secara keseluruhan angka kelulusan bagi seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Cirebon hampir mencapai 100%. Angka kelulusan jenjang pendidikan Dasar (SD/MI) pada tahun 2019 sebesar 97.50%, angka pada tahun 2023 sebesar 110.8% angka tersebut mengalami kenaikan rata-rata dari tahun 2019 hingga 2023 sebesar 3.33%. Angka

Kelulusan Pendidikan Menengah (SMP/MTS) pada tahun 2019 sebesar 81.61%, tahun 2023 sebesar 96.72%, dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan sebesar 5.87%, sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan sebesar 3.78%.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8.54%. Angka Kelulusan pendidikan Atas (SMA/SMK/SMA-LB) pada tahun 2019 sebesar 71.29%, tahun 2019-2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8.54%. Di tahun 2023 mengalami penurun sebesar 1.6% dari 96.92% menjadi 95.32%.

Pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur menjadi standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud di bidang pendidikan yakni penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan agar dapat menyerap partisipasi kelompok penduduk usia sekolah serta peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembelajaran agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pengukuran kinerja pelayanan pendidikan dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui indikator Ruang Kelas Baik (%), Rasio Bangunan sekolah terhadap kelompok usia sekolah. Lebih lanjut akan dijelaskan pada masing-masing indikator dibawah ini:

1) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Usia Pendidikan

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Usia Pendidikan bermanfaat untuk mengetahui rata-rata sekolah dalam menampung anak usia pendidikan. Ketika angka yang dihasilkan semakin besar maka kemampuan sekolah dalam menampung anak dalam sekolah semakin besar. Batas kemampuan sekolah dalam menampung anak usia pendidikan sekolah dalam Pendidikan SD 336 Siswa (7-12) tahun, SMP 1056 Siswa (13-15) tahun dan SMA yakni 750 siswa. Sedangkan batas kemampuan sekolah dalam menampung anak usia pendidikan sekolah dalam SMK yakni 2250 siswa. Rata-rata satu sekolah

SMA/SMK hanya menampung tidak kurang dari 600/sekolah pada anak usia pendidikan sekolah (16-18) tahun.

Rendahnya kemampuan sekolah dalam menyerap anak usia pendidikan sekolah (7-12, 13-15, 16-18 tahun) dipengaruhi salah satunya oleh Angka Partisipasi Murni/Kasar. Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat hingga tahun 2023 102,28% dan APM 96,90%, Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat hingga tahun 2023 102,72% dan APM 95,01%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat hingga tahun 2023 sebesar 123,13%, sedangkan Angka Partipasi Murni (APM) jenjang SMA/Sederajat hingga tahun 2023 sebesar 90,01%. Data APK/APM sebelumnya menguatkan bahwa anak usia penduduk (7-12, 13-15, 16-18 tahun) belum memiliki aksesbilitas pendidikan penuh. Sehingga kondisi tersebut berdampak terhadap daya tampung pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap rasio sekolah terhadap anak usia sekolah melainkan pada rasio jumlah guru/murid dalam per-kelas.

2) Ruang Kelas Baik (%)

Ruang Kelas Baik memberikan informasi persentase Ruang Kelas dalam kondisi Baik dari seluruh Ruang Kelas yanga ada. Standar pelayanan pendidikan tidak hanya sebatas pada penyediaan berkenaan dengan infrastruktur melainkan pelayanan dalam penyediaan tenaga peserta didik tak kalah penting sebagai upaya melahirkan peserta didik yang berkualitas. Pada periode Renstra sebelumnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, salah satunya menyasar pada peningkatan serta pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas. Evaluasi kinerja pelayanan dalam penyediaan tenaga kerja yang berkualitas serta pemerataan menggunakan beberapa indikator, dinataranya: Rasio jumlah Guru terhadap murid per-kelas, Rasio guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

1) Rasio Guru terhadap siswa per-kelas

Rasio Guru terhadap siswa perkelas diartikan kapasitas satu guru mengajar dalam kelas dapat mengajar ssejumlah siswa. Idealnya untuk satu Guru dapat

mengajar Pendidikan Sekolah Dasar 28 dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 32 dan Pendidikan Menengah-Atas sebesar 36, artinya bahwa satu orang guru dapat mengajar sebesar 28, 32 atau 36 siswa dalam kelas. Selama ini satu rombongan belajar didalam kelas masih menunjukan batas ideal yakni untuk SD sebesar 28 siswa serta SMP 28 siswa, SMA sebesar 36 siswa. Rombel dalam strata pendidikan atas masih menunjukan angka yang rendah yakni sebesar 22 siswa. Rendahnya rombel pada jenjang sekolah dasar dan menengah atas disebabkan rendahnya daya serap pendidikan terlihat dari APS yang masih rendah. Pada jenjang sekolah Dasar rasio antara Guru terhadap Murid melebihi dari batas ambang yang ditentukan yakni satu guru/20 siswa. Pada tahun 2023 rasio Guru terhadap siswa mencapai 22 siswa. Sebaliknya pada jenjang SMP maupun SMA/Sederajat masih memiliki rasio dibawah dari ambang batas mkasimum yakni dibawah 36. Kondisi tersebut bisa menimbulkan efek positif artinya bahwa kebutuhan guru sudah terdistribusi dengan baik namun negatifnya yakni akibat efek yang ditimbulkan dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar/Murni.

2) Rasio Guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik tergambar dari rasio guru yang memenuhi kualifikasi jenjang PAUD/SD/SMP. Di tahun 2023 Guru PAUD/SD/SMP yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV yakni sebesar 7649 orang Guru. Jumlah tersebut dari tahun 2019 - 2023 Guru TK/SD/SMP yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0.3% per tahun. Keberhasilan program tersebut tak lepas dari fokus kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatan mutu pendidikan salah satunya memberikan bantuan dana pendidikan kepada guru baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan peningkatan pendidikan S-1 maupun Pelatihan Profesi Guru atau dikenal dengan istilah PPG. (tabel 2.1)

Pencapaian atas kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak terlepas atas Anggaran serta Realisasi Anggaran terkait program pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan selaku Perangkat

Daerah melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan termasuk ke dalam salah satu program yang bersifat prioritas dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dibuktikan bahwa 20% alokasi dari total APBD diarahkan untuk pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 mengamanatkan kepada daerah minimal alokasi Dana Pendidikan sebesar 20% dari total APBD.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabuapten Cirebon Tahun 2019 – 2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASPEK PELAYANAN UMUM												
Layanan Urusan Wajib Dasar												
1.	**Pendidikan**											
1.1.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											
1.2.	Angka partisipasi kasar	16.73	17.67	18.02	50.09	49.39	66.4	65.8	42.03	48.49	52.71	
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	11408	11722	11954	11792	15982	17412	13757		14553	16707	
1.4.	**Angka Partisipasi Murni**											
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	101.90	98.09	99.997	106.5	106.52	107.33	103.32	103.75	90.53	90.68	
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.20	69.6	101.76	94.85	95.54	97.46	97.88	126.36	87.63	94.30	
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	61.13	57.85	84.58	85.40	75.92	86.40	66.95	99.48	85.51	87.65	
1.5.	**Angka partisipasi sekolah**											

1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	101.90	98.09	99.997	106.5	106.52	107.33	103.32	103.75	90.53	90.68	
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	91.20	69.6	101.76	94.85	95.54	97.46	97.88	126.36	87.63	94.30	
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	61.13	57.85	84.58	85.40	75.92	86.40	66.95	99.48	85.51	87.65	
1.6.	**Angka Putus Sekolah:**											
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.02	
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.45	0.45	0.68	0.35	0.29	0.24	0.20	0.14	0.12	0.11	
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.40	0.37	0.72	0.29	0.56	0.48	0.21	0.15	0.25	0.26	
1.7.	**Angka Kelulusan:**											
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99.5	99.5	98.99	96.5	95.8	100.03	97.5	99.10	99.30	100	
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.41	100	100	83.23	82.06	80.81	81.61	97.00	98.20	99.23	
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	87.48	91.73	100	75.035	75.9	80.60	71.29	73.23	85.04	96.92	
1.8.	**Angka Melanjutkan (AM):**											
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88.85	97.53	105.35	110.41	108.82	108.97	110.66	117.23	113.32	106.52	

1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	102.52	89.48	93.22	107.80	108.99	111.85	118.20	117.07	99.17	97.83	
1.9.	**Fasilitas Pendidikan:**											
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi Ruang Kelas baik	68.14	69	67.51	23.02	66.39	65.82	64.6	63.46	67.81	62.46	
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi Ruang Kelas baik	76.55	77.85	80.15	79.69	81.35	79.38	80.36	73.59	70.10	76.36	
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	228	238	227	219	219	219	215	210	138	212	
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	416	472	487	426	425	421	415	358	337	333	
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	26	24	23	20	20	21	20	20	20	21	
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	17	20	18	17	16	15	15	14	14	16	
1.14.	Rasio murid per kelas rata-rata sekolah dasar	28	28	30	30	27	22	26	27	27	26	

1.15.	Rasio murid per kelas rata- rata Sekolah Menengah Pertama	27	34	36	31	29	32	31	24	31	31	
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	99.50	99.5	98.99	96.5	95.8	100.03	97.5	99.10	99.30	100	
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki		94.76	94.96	95.16	94.77	95.53	57.76	99.73%			
1.18.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Sekolah Dasar	80.34	77.97	84.92	89.66	94.05	95.42	96.86	97.06	94.69	88.44	
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Sekolah Menengah Pertama	93.10	94.42	99.29	95.05	96.46	97.27	97.93	97.63	97.24	70.73	

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Terkait dengan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan memerlukan hasil analisis SWOT berkenaan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Analisa SWOT melibatkan kondisi eksternal serta kondisi internal baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelayanan Dinas Pendidikan.

Ketidaktercapaian atas pelayanan program dinas pendidikan tidak terlepas dari tantangan serta kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sendiri. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan serta melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Kekuatan *(Strenght)* bersumber dari kondisi internal yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Kelemahan *(Weakness)* bersumber dari kondisi Internal yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Peluang *(Opportunity)* bersum dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ancaman (*Threat*) bersumber dari kondisi eksternal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

1. **Kekuatan*(Strenght)***

Kekuatan *(Strenght)* yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Tersedianya anggaran yang cukup besar dialokasikan guna penyelenggaraan pendidikan. Anggaran bagi peyelenggaraan pendidikan sebesar 20% dari APBD. Dengan anggaran yang begitu besar maka memberikan ruang yang cukup luas dalam memberikan pelayanan program pendidikan.

2) Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kabupaten Cirebon dinilai sudah memadai, hal tersebuut tampak keseuaian antara kebutuhan dengan sumber daya manusia untuk menjalankan program pelayanan pendidikan.

3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan program layanan pendidikan.

4) Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penungjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas.

2. Kelemahan *(Weakness)*

Kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Koordinasi serta kerjasama antara Bidang dinilai belum optimal.Sehingga memerlukan peningkatan terutama dalam perencanaan dan implementasi program.

2) Terjadinya perbedaan produktivitas dan hasil kerja diantara masing-masing bidang.

3) Pengembangan program kerja tahunan yang dilakukan oleh masing-masing bidang tidak mengacu pada program Rencana Strategis lima tahunan, sehingga keberlanjutan program kurangtercapai.

4) Pembuatan progam yang dilakukan oleh masing-masing bidang dinilai kurang memperhatikan aspek *Outcome*, *Output* serta tujuan dan sasaran program.

5) Masing-masing bidang kurang optimal dalam memberikan data perihal hasil evaluasi program maupun data yang berkaitan dengan indikator pendidikan kepada Bagian pelaporan dan perencaanaan. Hal tersebut menyulitkan bagi tim perencana dalam membuat *planing*.

3. Peluang*(Opportunity)*

Peluang *(Opportunity)* yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai salahsatu upaya peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut

memiliki dampak terhadap peningkatan daya serappendidikan

2) Bidang Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas pembangunan, implikasinya bahwa pendidikan menjadi salah satu program yang bersifat strategis.

3) Seiring dengan meningkatnya kelompok usia sekolah maka meningkat pula lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh YayasanPendidikan.

4) Dengan adanya arus Globalisasi memberikan dampak positif bagi pengelolaan layanan pendidikan baik dalam hal riset, kerjasama peningkatan mutu tenaga pendidik dengan Univeristas Luar Negeri maupun pertukaranpelajar.

5) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran baik melalui riset model pembelajaran maupun pengenalan teknologi dalam pembelajaran.

4. Ancaman(*Threat*)

Ancaman *(Threat)* yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangidengan infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan daya serappendidikan.

2) Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.

3) Rendahnya jati diri (budaya lokal) diakibatkan sikap pragmatisterhadap budaya asing yang masuk melalui arus globalisasi dimoderasi olehteknologi.

4) Banykanya kelompok usia sekolah lebih memilih untuk menikah atau

ekerja dibawah umur dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebihtinggi.

5) Hambatan aksesbilitas pendidikan yang diakibatkan oleh persoalan himpitan ekonomikeluarga.

6) Kesenjangan dalam hal pemerataan guru yang berkualitas serta tata kelola pendidikan yang baik antar Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

7) Rendahnya sinkronisasi pembangunan pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan yakni Pemerintah daerah setempat.

8) Belum adanya peraturan/ payung hukum terkait dengan *mandatory list*, hal tersebut memiliki risiko akan semua program yang direncanakan tidak memiliki keberlanjutan.

Hasil dari analisa SWOT berkaitan dengan tantangan dan peluang maka dapat disimpulkan bahwa tantangan berkenaan dengan pelayanan pendidikan aksesbilitas, peningkatan kualitas mutu dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sehingga kedepan fokus pengembengan layanan pendidikan berfokus pada ketiga hal tersebut diimbagi dengan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan Pendidikan 2025-2026 tentunya menjadi antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan lima tahun berikutnya yaitu tahun 2025-2026. Beberapa tantangan pembangunan Pendidikan yang dihadapi ke depan adalah:

(1) Belum meratanya akses Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu Pendidikan;(3) Belum optimalnya tata kelola Pendidikan; (4) Masih rendahnya minat baca masyarakat. Keempat permasalahan di atas ditandai hal-hal sebagai berikut:

- Belum meratanya distribusi guru PNS
- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi
- Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah
- Belum sinergisnya pembagian tata kelola Pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait kewenangan.
- Rendahnya partisipasi Pendidikan di tingkat Pendidikan menenga

Rendahnya minat baca masyarakat,

- Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek- aspek perpustakaan lainnya
- Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi maupun melalui program perpustakaan keliling
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah, untuk bekerja sama dengan komunitas literasi. Seperti forum perpustakan desa/kelurahan atau, forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Dengan beberapa permasalahan yang ada, maka berakibat pada Indek Angka Rata-rata Pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks

Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 baru pada kisaran 6,92 tahun, ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2020 baru mencapai 12,57 Tahun.

Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebesar 12,57 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,57 tahun atau setara dengan Diploma I.

Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesbilitas Pendidikan belum merata	1 Masih kekurangan Ruang Kelas pada Sekolah Negeri terlebih untuk jenjang SMP
			2 Kemampuan daya siswa yang masih terbatas
			3 Masih ada animo masyarakat harus bersekolah di sekolah Negeri atau Sekolah yang Tekenal (Favorit)
			4 Belum diterapkannya Sistem zonasi pada jenjang Sekolah Dasar
		2 Kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	1 Guru PNS masih kurang pada Sekolah Negeri
			2 Masih banyak guru yang belum bersetifikat pendidik sesuai profesinya
			3 Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak reward atau funishment
			4 Kurang maksimalnya fungsi peran komunitas belajar (KKG/MGMP, KKKSD/MKKSSMP))
			5 Masih banyaknya guru yang belum linear dalam mengampu pembelajaran.
			6 Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah terutama Honorer (Non ASN)
			7 Belum efektifnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Kepala Sekolah (PKKS)
			8 Belum berjalannya sistem Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Capaian SKP tahunan PNS Khususnya.
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum mamadai	1 Kondisi ruang kelas masih banyak yang rusak
			2 Alat praktik dan peraga pembelajaran banyak yang rusak
			3 Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki sarana utama

				penunjang pembelajaran (Labora-Torium dan Perpustakaan)
No.	**Masalah Pokok**	**Perasalahan**		**Akar masalah**
			4	Standar harga sarana penunjang KBM tinggi
			5	Masih banyaknya sekolah yang belum menyediakan fsilitas fisik ramah anak/murid
		4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah	1	Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
			2	Tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan pengaruh lingkungaan dalam pergaulan anak
			3	Jumlah sekolah yang menerapkan program sekolah inklusi untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus sangat kurang
			4	Masih belum maksimalnya pemberdayaan MBS dalam pengelolaan sekolah
			5	Belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan program kerja sekolah (RKS/RKAS)
			6	Masih banyaknya sekolah dalam manajemen RKS (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindaklanjut) belum sistemik (siklus standar mutu)

3.1.1 Aksesibilitas pendidikan belum merata

a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;

c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;

d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan ijazas sebagai syarat diterimanya bekerja;

3.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;

c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

3.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai

a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

3.1.4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
c) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
f) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN" dan **Misi** :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya "Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat

2. Kabupaten Cirebon Sejahtera "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon Agamis "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika"
4. Kabupaten Cirebon Maju "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"
5. Kabupaten Cirebon Maju "Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional"

dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya yang tertera pada misi ke **1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

3.3. Talaahan Rencana Strategis

Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam lima tahun kedepan visi Gubernur Jawa Barat yakni **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "**. Makna dari Visi tersebut adalah Jabar Juara Lahir Batin bahwa pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi adalah bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan Publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makna Kolaborasi adalah perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk mewujudkan Jabar Juara maka dilakukan beberapa misi, salah satunya aspek misi dalam ruang lingkup pendidikan. Misi tersebut

"**Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif"**. Misi ini diarahkan menghadirkan pelayanan publik berkualitas hingga ujung batas wilayah. Agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati Pendidikan dan kesehatan. Perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya untuk dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari misi tersebut melahirkan beberapa program sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yakni Menghadirkan Sekolah Jabar yaitu Inovasi Layanan Pendidikan Menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses Layanan Pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lainnya. Melalui layanan Pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Telaahan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tekhnologi

Landasan pembangunan pendidikan di Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni **"Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif di tahun 2025".** Makna insan yang cerdas yakni ditinjau berdasarkan spiritual, emosional dan social mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Makna dari misi diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat yakni meningkatkan Guru, Siswa dan Tenaga Kependidikan dalam pelestarian dan pengembangan budaya serta diarahkan pada perilaku yang mandiri.
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata yakni mengoptinalkan layanan pendidikan 12 tahun serta meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khusus bagi pendidikan yang berkebutuhan khusus dan wilayah 3T.
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu yakni meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional, meningkatkan percepatan mutu pendidikan dalam menghadapi kondisi Global melalui pelayanan Inovasi Pendidikan.
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa yakni dilakukan

dengan cara pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa, membangkitkan karakteristik bangsa indonesia, meningkatkan apresiasi seni dan karya budaya indonesia.

5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dilakukan dengan cara memaksimalkan pelibatabn publik dalam aspek pengelolaan kebijakan berbasis pada data, riset, bukti lapangan, Meningkatkan kapasistas tata kelola pendidikan di daerah, Mengembangkan koordinasi lintas sektor di tingkat nasional, Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan Kemendikbud yang bersih, efektif dan efisien.

Dari Misi yang dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki hubungan erat dengan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Misi kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yakni Aksesbilitas Pendidikan yang merata, Peningkatan Mutu Pendidikan serta Tata kelola pendidikan.

3.3.1. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

a). Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dalam misi 1 “**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”**. Implementasi hal tersebut

tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.

d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.

b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.

c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c)

kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.

d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

3.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua

Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencaup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata,

industri, perikanan budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon tahun 2018-2023 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi internal dinas pendidikan maupun kondisi eksternal yang berasal dari luar Dinas Pendidikan sendiri. Beberapa metode dilterapkan dalam menganalisis isu strategis secara internal yang dialami oleh dinas pendidikan.

Seiring dengan berjalanya waktu perkembangan dunia saat ini berjalan secara dinamik diimbangi dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, hal tersebut yang melatarbelakangi adanya perkembangan di Abad-21. Tentunya perkembangan

abad 21 menjadi tatantangan yang bergitu besar bagi Sumber Daya Manusia kedepan khususnya di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dikarenakan wilayah Kabupaten Cirebon memiliki potensi kelompok usia produktif yang cukup besar, jika tidak dipersiapkan secara matang melalui pendidikan maka akan berdampak negatif. Salah satunya yakni adalah timbulnya pengangguran, dikarenakan kehidupan di abad 21 merupakan awal dari perkembangan revoulsi Industri 4.0.

Berkenaan dengan tantangan global yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini, adapun isu strategi dari persoalan pendidikan yang dapat menghambat dalam menghadapi tantangan di abad 21:

1. Masih redahnya aksesibilitas pendidikan bagi seluruh kalangan penduduk khususnya jenjang pendidikan atas masih menunjukan angka persentasi yang rendah.
2. Masih terjadinya kesenjangan pengelolaan pendidikan di daerah sehingga berdampak terhadap kualitas *outcome* pendidikan tersebut.
3. Masih terjadinya kesenjangan penyediaan tenaga pendidik berkualitas yang ada didaerah berdampak terhadap kualitas *outcome* pendidikan tersebut.
4. Masih terjadinya kesenjangan penyediaan infrastruktur maupun teknologi yang menunjang KBM maupun evaluasi KBM. hal tersebut berdampak penerapan Ujian KBM secara *online* yang tidak dapat diselenggarakan oleh seluruh sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Belum terwujudnya harmonisasi kebijakan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sebagai pilar dari tata kelola pendidikan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang efektif.

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tatakelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainaya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.
2. Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.
3. Tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”*Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”*

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2025 - 2026) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

upaya yang dilakukan :

4.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki

kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil ANBK peserta didik SD dan SMP masih rendah.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

4.2. SASARAN

4.2.1. Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu factor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

4.2.2 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan

sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4.2.3 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

4.2.4 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dari pokok persoalan di atas dapat disimpulkan tujuan dan sasaran dari Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2025 - 2026) yakni:

1. Semua Anak Sekolah.
2. Lulusan sekolah yang kompetitif.
3. Kepuasan *stakeholders* Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

a. SAKIP Dinas Pendidikan
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang professional
c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian SNP
d. Sistim Informasi Manajeman Dinas Pendidikan pengelolaan data.
e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tabel T.C 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.1	**Meningkatnya Derajat dan Pendidikan Masyarakat**		Indeks Pendidikan	10.44 Poin	11.00 Poin	0.00	0.00	0.00
1.1.1		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Presentase Angka Partisipasi Sekolah	100 Persen	100	0.00	0.00	0.00
1.1.2		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Presentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	0.00	0.00	0.00
1.1.3		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Indeks Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	0.00 Persen	0.00	0.00	0.00	0.00
			Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM)	100 Persen	100	0.00	0.00	0.00
1.1.4		Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	Indkes Pelayanan	100 Poin	100	0.00	0.00	0.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025—2026 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2026. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2025—2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Strategi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata, dan mengembangkan pendidikan karakter.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Apabila diamati secara seksama, Guru Negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan.

Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan adalah membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

   Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

   Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga

belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.2. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

5.1.3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.4 Peningkatan Layanan Tatakelola Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

5.1.4. Peningkatan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

Stategi yang diterapkan rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi).

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pendidikan

Kualitas/Mutu guru adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu guru masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu tenaga pendidik ditandai dengan rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) serta tanda bukti kelulusan / izazah siswa tidak dijadikan barometer oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berijazah atau tidak bagi DUDI adalah sama saja, tidak ada perbedaan, akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikant terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung

terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.2. Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasan Serta Pendidikan Non Formal

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan msyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercpta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. ebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

5.2.3. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Memanfaatka Dana APBN, APBD Serta Dana Lain yang Syah.

Untuk mencapai ujuan pembelajaran diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sehebat apapun guru mengajar bila tidak ditunjang dengan sarana prasarana maka hasilnya dipastikan tidak akan memuaskan.

Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan dana agar kekurangan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (RPL) serta alat peraga pendidikan terpenuhi, agar ruang kelas dan RPL dalam kondisi baik serta terpenuhinya kebutuhan prasaranya. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka kebutuhan tersebut belum dapat tercukupi.

Untuk memenuhinya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, memberdayakan komite sekolah, memanfaatkan dana dari masyarakat seperti alumni, tokoh masyarakat, CSR serta dana lain yang syah.

5.2.4. Pengelolaan Pendidikan Melibatkan Masyarakat Peduli Pendidikan Sesuai Kewenangannya

Peranserta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sokolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalampengelolaan pendidikan.

Selain itu dalam rangka kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran diperlukan pula pera msyarakat secara umum untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal dalam membentuk anak bangsa yang cerdas dan berahlak mulia.

5.2.5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan

Peningkatan layanan tatakelola manajeman dan admintrasi perkantoran dalam mencapai tata kelola pendidikan yang akuntabilitas dan transparasi dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu penyempurnaan sistem manajeman dalam pelaporan kinerja pemerintah, yang akuntabel, mengarahkan kepada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan menerapkan e-budgeting sebagai upaya E-Goverment *d*alam penyelenggaraan kegiatan, Menerapkan *Open Goverment* di dalam lingkungan Dinas

Tabel T.C 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

VISI : TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG CERDAS DAN KOMPETITIF			
MISI 1 :	**Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu bagi Peserta Didik**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Derajat dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan.	Pemerataan layanan pendidikan.	Meningkatkan Perluasan jaminan akses dan fasilitasi layanan pendidikan formal maupun pendidikan Non formal.
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan.	Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.	Meningkatkan kualitas prodesionalisme Sumber Daya Manusia bidang pendidikan.
		Sumberdaya sarana dan prasarana.	Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan, memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang sah.
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan.	Kualitas tatakelola manajemen pendidikan.	Pengelolaan pendidikan melibatkanmasyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan.	Peningkatan dan penguatan mutu pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan.	Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Pelayanan Publik bidang pendidikan terhadap masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama lima tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesbilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal diperlukan program dan kegiatan yang berkualitas bagi Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP serta pendidikan lain yang setara. Isi, Proses dan Penilaian merupakan tiga Standar Nasional Pendidikan yang terintegrasi menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelaksanaan tiga standar tersebut sangat menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Keterpaduan antar isi, proses dan penilaian tidak terlepas dari nilai-nilai moral, religi dan budaya keluarga serta masyarakat setempat sebagai tanggungjawab bersama.
Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui pembiasaan kehidupan siswa, program/kegiatan prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut.

1. NON URUSAN

Program Sekretariat memiliki rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi). Berdasarkan poin sasaran strategis utama yang ingin dicapai, kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
    1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6) PEnyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah;

2. URUSAN

Program Urusan Bidang ini berisi kegiatan yang bersifat sistematis bekenaan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal pada jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan jenjang Pendidikan Non Formal dalam hal kuantitas dan kualitas yang sudah disesuaikan dengan renstra Dinas Pendidikan. Program tersebut dibagi berdasarkan sasaran strategis diantaranya

a. Program Pengelolaan Pendidikan
   1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
   2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan;
b. Program Pengembangan Kurikulum
   1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Pemerintah. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk itu rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				Indeks Pendidikan	13,5 Poin	10,44	2.128.267.565.028	11	3.349.007.641.688	0	0	0	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan				Persentase Angka Partisipasi Sekolah	100 Persen	100	336.891.272.500	100	371.435.398.200	0	0		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase APK TK / PAUD	70 Persen	70,3	11.675.950.000	72	14.156.500.000	72	25.832.450.000		
				Persentase APK SD / Sederajat	100 Persen	100	76.925.149.000	100	81.425.149.000	100	158.350.298.000		
				Persentase APK SMP / Sederajat	100 Persen	100	126.908.346.900	100	128.352.492.800	100	255.260.839.700		
				Persentase APM SD / Sederajat	100 Persen	100	88.626.778.000	100	114.746.207.800	100	203.372.985.800		
				Persentase APM SMP / Sederajat	100 Persen	100	32.755.048.600	100	32.755.048.600	200	65.510.097.200		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				0		0		0		
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru Telah Dibangun	0 Unit	1	3.124.035.000	1	3.592.641.000	2	6.716.676.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0		0		0			
		02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Paket	386	58.446.800.000	386	58.446.800.000	772	116.893.600.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	200	15.000.000.000	200	19.500.000.000	400	34.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	

	02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	215.607	3.478.349.000	215.607	3.478.349.000	431.214	6.956.698.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	5.000		5.000		5.000			
	02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	930 Satuan Pendidikan	883	6.440.947.000	883	8.373.232.000	1.766	14.814.179.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
			Jumlah Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0		0		0			
	02.2.01.0033.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
	02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	190	79.061.796.000	190	102.780.334.800	380	181.842.130.800	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
			Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	0 Ruang	142		143		285			
	02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.	200.000 siswa	205.000	159.663.395.500	210.000	161.107.541.400	415.000	320.770.936.900		
	02.2.02.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
	02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90.000 Ruang	91.000	7.866.215.500	92.000	8.652.837.100	183.000	16.519.052.600	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangla Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Derajat dan Pendidikan Masyarakat				Indeks Pendidikan	13,5 Poin	10.44	2.128.267.565.028	11	3.349.007.641.688	0	0	0	
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pendidikan			Presentase Angka Partisipasi Sekolah	100 Persen	100	336.891272500						
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Presentase APK TK/PAUD	70 Persen	703	336.891.272.500						
				Presentase APK SD/Sederajat	100 Persen	100	11.675.950.000						
				Presentase APK SMP/ Sederajat	100 Persen	100	76.925.149.000						
				Presentase APM SD/Sederajat	100 Persen	100	88.626.778.000						
				Presentase APM SMP/ Sederajat	100 Persen	100	32.755.048.600						
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**										
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru Telah Dibangun	0 Unit								
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit								
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun									
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia									
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Dilaksanakan Pemeliharaan									
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah									
			Pengelolaan Pendidikan										

			Sekolah Menengah Pertama										

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				Indeks Pendidikan	13,5 Poin	10,44	2.127.814.508.028	11	3.348.455.584.688	0	0	0	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan			Persentase Angka Partisipasi Sekolah	100 Persen	100	336.891.272.500	100	371.435.398.200	0	0		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase APK TK / PAUD	70 Persen	70,3	11.675.950.000	72	14.156.500.000	72	25.832.450.000		
				Persentase APK SD / Sederajat	100 Persen	100	76.925.149.000	100	81.425.149.000	100	158.350.298.000		
				Persentase APK SMP / Sederajat	100 Persen	100	126.908.346.900	100	128.352.492.800	100	255.260.839.700		
				Persentase APM SD / Sederajat	100 Persen	100	88.626.778.000	100	114.746.207.800	100	203.372.985.800		
				Persentase APM SMP / Sederajat	100 Persen	100	32.755.048.600	100	32.755.048.600	200	65.510.097.200		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				0		0		0		
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru Telah Dibangun	0 Unit	1	3.124.035.000	1	3.592.641.000	2	6.716.676.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0		0		0			
		02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Paket	386	58.446.800.000	386	58.446.800.000	772	116.893.600.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	200	15.000.000.000	200	19.500.000.000	400	34.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	215.607	3.478.349.000	215.607	3.478.349.000	431.214	6.956.698.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	5.000		5.000		5.000			
		02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	930 Satuan Pendidikan	883	6.440.947.000	883	8.373.232.000	1.766	14.814.179.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0		0		0			
		02.2.01.0033.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	190	79.061.796.000	190	102.780.334.800	380	181.842.130.800	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	0 Ruang	142		143		285			
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.	200.000 siswa	205.000	159.663.395.500	210.000	161.107.541.400	415.000	320.770.936.900		
		02.2.02.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	2.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90.000 Ruang	91.000	7.866.215.500	92.000	8.652.837.100	183.000	16.519.052.600	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Ruang kelas sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		0		0			
		02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 Unit	90	143.000.000	100	157.300.000	190	300.300.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0		0		0			
		02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Persen	100	26.234.578.000	100	26.366.347.000	200	52.600.925.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Mebel Sekolah	0 Paket	0		0		0			
		02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan	230	90.614.553.400	240	91.126.008.700	470	181.740.562.100	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Sekolah Menengah pertama Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0		0		0			
		02.2.02.0044.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Ruang	30	2.050.000.000	50	2.050.000.000	80	4.100.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		0		0			
		02.2.02.0055.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah sekolah yang terlayaninya dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 sekolah	130		130		130		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang	80	31.755.048.600	80	31.755.048.600	160	63.510.097.200	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	0 Ruang	0		0		0			
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK/PAUD) terlayani kebutuhan penddikannya	65.000 Siswa	7.000	11.675.950.000	73.000	14.156.500.000	80.000	25.832.450.000		
		02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit	2	200.000.000	2	220.000.000	4	420.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Lokal	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	2.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0004.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2	200.000.000	2	220.000.000	4	420.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	50	500.000.000	100	1.000.000.000	150	1.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	150	300.000.000	200	400.000.000	350	700.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	1.400	25.000.000	1.450	30.000.000	2.850	55.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	20	800.000.000	50	2.000.000.000	70	2.800.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	33.136 Peserta Didik	37.000	150.000.000	38.500	200.000.000	75.500	350.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	20	120.000.000	30	180.000.000	50	300.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.959 Orang	3.010	110.000.000	3.200	125.000.000	6.210	235.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	750 Satuan Pendidikan	760	250.000.000	795	265.000.000	1.555	515.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	700 Satuan Pendidikan	800	200.000.000	825	250.000.000	1.625	450.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0019.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	700 Satuan Pendidikan	825	250.000.000	850	275.000.000	1.675	525.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0025.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0026.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Satuan Pendidikan	800	250.000.000	850	300.000.000	1.650	550.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	2	400.000.000	2	400.000.000	4	800.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	2	400.000.000	2	400.000.000	4	800.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0034.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta didik	6.000	250.000.000	6.500	300.000.000	12.500	550.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0035.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	18.390	1.930.950.000	18.700	1.963.500.000	37.090	3.894.450.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0037.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	140.000.000	1	160.000.000	1	300.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0040.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	1	1.500.000.000	1	1.600.000.000	2	3.100.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	23.000 Paket	36.000	2.520.000.000	37.400	2.618.000.000	73.400	5.138.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon	100 Persen	100	283.499.504.400	100	1.850.259.573.200	0	0		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka jumlah lulusan siswa SD/MI	100 Persen	100	226.517.339.000	100	291.708.248.300	100	518.225.587.300		
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket A	100 Persen	100	4.824.000.000	100	1.504.206.000.000	200	1.509.030.000.000		
				Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs	100 Persen	100	45.612.215.400	100	45.935.824.900	200	91.548.040.300		
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket B	100 Persen	100	186.000.000	100	215.000.000	200	401.000.000		
				Angka jumlah Lulusan Warga BelajarPaket C	100 Persen	100	1.805.000.000	100	2.365.000.000	100	4.170.000.000		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				0		0		0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	149 Ruang	48	11.371.440.000	50	13.374.872.000	98	24.746.312.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	651 Unit	188	27.941.678.000	187	36.123.798.100	375	64.065.476.100	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	54	12.823.506.000	55	16.956.557.800	109	29.780.063.800	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	120	14.400.000.000	120	18.720.000.000	240	33.120.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	6	600.000.000	9	900.000.000	15	1.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang	170	22.000.000.000	170	28.600.000.000	340	50.600.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket	152	15.200.000.000	152	19.760.000.000	304	34.960.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	40	4.000.000.000	40	4.000.000.000	80	8.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	250	536.943.000	250	536.943.000	500	1.073.886.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Persen	80	321.756.000	80	321.756.000	160	643.512.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	400	418.283.000	400	543.768.000	800	962.051.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	0 Ruang	152	38.076.208.000	152	49.484.770.400	304	87.560.978.400	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0035.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Kegiatan	1	150.000.000	1	195.000.000	2	345.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0042.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	20	2.000.000.000	20	2.600.000.000	40	4.600.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0045.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	199.280	29.892.000.000	199.280	38.859.600.000	398.560	68.751.600.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1	905.525.000	1	1.177.183.000	2	2.082.708.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100 Paket	320	6.400.000.000	320	8.320.000.000	640	14.720.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	250	100.000.000	250	130.000.000	500	230.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Kegiatan	1.014	300.000.000	1.014	300.000.000	2.028	600.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	229 Ruang	428	39.080.000.000	428	50.804.000.000	856	89.884.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.	200.000 siswa	205.000	45.612.215.400	210.000	45.935.824.900	415.000	91.548.040.300		
		02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	5	900.000.000	5	900.000.000	10	1.800.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	20	3.600.000.000	20	3.600.000.000	40	7.200.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	2.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	10	4.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0007.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	0 Ruang	15		15		30		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0010.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	10	2.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	85 Unit	85	371.030.000	85	408.133.000	170	779.163.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0016.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	20		25		45		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	25	5.017.020.000	25	5.017.020.000	50	10.034.040.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang	40	1.700.000.000	40	1.700.000.000	80	3.400.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima bantuan biaya personil	0 Peserta Didik	500		500		500		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1	21.409.100.000	1	21.409.100.000	2	42.818.200.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Ajang Talenta Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa SMP yang terselenggara	52 even Lomba	6	1.650.000.000	6	1.815.000.000	6	3.465.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	520 Orang	620	406.033.900	720	421.637.300	1.340	827.671.200	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0045.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20	1.750.000.000	20	1.750.000.000	40	3.500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya layanan PPDB yang transparan, akuntabel, berkeladilan dan sesuai pedoman yang berlaku pada 80 SMP Negeri	82.217 Satuan Pendidikan	80	397.948.100	80	437.742.900	80	835.691.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2	661.083.400	2	727.191.700	4	1.388.275.100	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	85	3.500.000.000	85	3.500.000.000	170	7.000.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang di Rehabilitasia	0 Pintu	2	6.815.000.000	2	1.506.786.000.000	4	1.513.601.000.000		
		02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	3	900.000.000	5	1.500.000.000.000	8	1.500.900.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	2	200.000.000	3	300.000.000	5	500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.000 Orang	1.200	300.000.000	1.300	350.000.000	2.500	650.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Satuan Pendidikan	85	620.000.000	85	750.000.000	170	1.370.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	80	200.000.000	85	300.000.000	165	500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0021.	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	2	100.000.000	2	150.000.000	4	250.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0024.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	79	150.000.000	79	175.000.000	158	325.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0027.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	79	150.000.000	79	175.000.000	158	325.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0030.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Orang	156		224		380		BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0031.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	150.000.000	1	175.000.000	2	325.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0033.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	0 Paket	1	30.000.000	1	35.000.000	2	65.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0035.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	400	250.000.000	400	300.000.000	800	550.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket A yang Tersedia	0 Lembar	2.400	4.000.000	2.400	6.000.000	2.400	10.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket B Tersedia	0 Lembar	20.000	36.000.000	30.000	40.000.000	50.000	76.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket C yang Tersedia	0 Lembar	36.000	40.000.000	36.000	45.000.000	72.000	85.000.000		
		02.2.04.0037.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	0 Buku	200	125.000.000	250	225.000.000	450	350.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0038.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	2	400.000.000	0	0	2	400.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0039.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	3	600.000.000	4	800.000.000	7	1.400.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	2	60.000.000	2	60.000.000	4	120.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7.000 Peserta Didik	7.500	2.200.000.000	8.000	2.500.000.000	15.500	4.700.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		02.2.04.0048.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	3	300.000.000	4	400.000.000	7	700.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka jumlah lulusan Peserta Didik PAUD/TK/RA	100 Persen	100	2.760.950.000	100	3.033.500.000	200	5.794.450.000		
				Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs	100 Persen	100		100		200			
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket A	50 Persen	60	715.000.000	70	1.115.000.000	130	1.830.000.000		
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket B	0 Persen	0	517.000.000	0	817.000.000	0	1.334.000.000		
				Angka jumlah Lulusan Warga BelajarPaket C	0 Persen	0	418.000.000	0	720.000.000	0	1.138.000.000		
				Angka jumlah lulusan siswa SD/MI	100 Persen	100	144.000.000	100	144.000.000	200	288.000.000		
		03.2.01.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah	0 Orang	400	194.000.000	400	196.000.000	400	390.000.000		
		03.2.01.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket A yang Tersusun	0 Dokumen	10	15.000.000	10	15.000.000	20	30.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket B yang Tersusun	0 Dokumen	11	17.000.000	11	17.000.000	22	34.000.000		
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket C yang Tersusun	0 Dokumen	12	18.000.000	12	20.000.000	24	38.000.000		
		03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	0 Orang	400	144.000.000	400	144.000.000	800	288.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
				Jumlah Guru Mulok yang meningkat kompetensinya dalam penyusunan dokumen kurikulum Mulok	0 Orang	300		300		300		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		03.2.01.0007.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Cirebon dan Bahasa Sumda Jenjang SMP	0 Dokumen	0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Persen	1	4.360.950.000	1	5.633.500.000	2	9.994.450.000		
		03.2.02.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen	2	180.000.000	2	250.000.000	4	430.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Presentase	100	200.000.000	100	400.000.000	100	600.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Presentase	100	200.000.000	100	400.000.000	100	600.000.000		
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	0 Persen	100	200.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000		
		03.2.02.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	0 Buku	18.390	1.930.950.000	18.700	1.963.500.000	37.090	3.894.450.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		03.2.02.0004.	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dinilai	1 Buku	1	200.000.000	1	250.000.000	1	450.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		03.2.02.0005.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	1	220.000.000	1	280.000.000	1	500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Nonformal yang tersusun	0 Dokumen	1	200.000.000	1	300.000.000	2	500.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	0 Dokumen	1	300.000.000	1	400.000.000	2	700.000.000		
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tersusun	0 Dokumen	1	200.000.000	1	400.000.000	2	600.000.000		
		03.2.02.0006.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun	1 Dokumen	1	230.000.000	1	290.000.000	1	520.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	1	300.000.000	1	400.000.000	2	700.000.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indeks Penerapan Manajeman Bebasis Sekolah	0 Persen	0	2.665.672.828	0	3.419.192.388	0	0		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentasi Penerapan Manajemen berbasis Sekolah (MBS)	100 Persen	100	1.477.055.600	100	1.820.517.700	100	3.297.573.300		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				0		0		0		
		02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	100 Satuan Pendidikan	100	38.428.000	100	49.957.000	200	88.385.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0030.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	930 Orang	883	219.598.000	883	285.478.000	1.766	505.076.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	883	120.749.000	883	156.974.000	1.766	277.723.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0039.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100	300.000.000	100	390.000.000	200	690.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.01.0043.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	1	300.000.000	1	390.000.000	2	690.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.	200.000 siswa	205.000	498.280.600	210.000	548.108.700	415.000	1.046.389.300		
		02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	80 Satuan Pendidikan	80	400.000.000	80	440.000.000	160	840.000.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		02.2.02.0043.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	220 Orang	230	98.280.600	240	108.108.700	470	206.389.300	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD	0 Persen	0		0		0			
				Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP	0 Persen	0	898.617.228	0	1.268.674.688	0	2.167.291.916		
				Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan rsertifikat pendidik jenjang PAUD	0 Persen	0	290.000.000	0	330.000.000	0	620.000.000		
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagai dasar penempatan guru sesuai kualifikasi yang dimiliki	1 Dok	1	1.188.617.228	1	1.598.674.688	2	2.787.291.916		
		04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	1	437.889.105	1	698.452.324	2	1.136.341.429	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	1	130.000.000	1	150.000.000	1	280.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		04.2.01.0002.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	1	460.728.123	1	570.222.364	2	1.030.950.487	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Dokumen	1	160.000.000	1	180.000.000	2	340.000.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM)	100 Poin	100		100		0			
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Capaian Indeks SPM Pendidikan Dasar	100 Poin	100		100		200			
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Indeks Pelayanan	100 Poin	100	1.504.758.058.300	100	1.123.341.420.900	0	0		
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Poin	100	1.504.758.058.300	100	1.123.341.420.900	100	2.628.099.479.200		
		01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan Anggaran sebagai dasar dalam oenetapan pelaksanaan kebijakan	6 Dok	6	407.475.481.000	6	3.681.056.800	12	411.156.537.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6	775.758.000	6	853.333.800	12	1.629.091.800	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	8	455.000.000	8	455.000.000	16	910.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
		01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	6	1.492.723.000	6	1.492.723.000	12	2.985.446.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	400.000.000	3	440.000.000	6	840.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	404.352.000.000	4	440.000.000	8	404.792.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan sebagai dasar dalam pengamblan kebijakan	5 Dok	5	1.083.412.577.800	5	1.104.725.266.000	10	2.188.137.843.800		
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.536 Orang/bulan	9.631	1.082.550.501.800	9.727	1.103.776.982.300	9.727	2.186.327.484.100	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	-
		01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5	200.000.000	5	220.000.000	10	420.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3	300.000.000	3	330.000.000	6	630.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0	200.000.000	2	220.000.000	2	420.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	68.301.000	0	75.131.200	0	143.432.200	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	93.775.000	0	103.152.500	0	196.927.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terselenggaranya layanan tata kelola aset barang milik Pemerintah Daerah	2 Dok	2	1.574.030.200	2	1.631.433.300	4	3.205.463.500		
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	15	150.000.000	15	165.000.000	15	315.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Dokumen	18	176.530.200	18	194.183.300	36	370.713.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	4	250.000.000	4	250.000.000	4	500.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	2	250.000.000	2	250.000.000	2	500.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	250.000.000	4	250.000.000	8	500.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4	250.000.000	4	250.000.000	8	500.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2	247.500.000	2	272.250.000	4	519.750.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				0		0		0		
		01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	6	250.000.000	6	275.000.000	12	525.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	9.631	2.384.000.000	9.631	2.384.000.000	19.262	4.768.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	3	225.000.000	3	247.500.000	6	472.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	4	200.000.000	4	220.000.000	8	420.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	40	250.800.000	40	275.880.000	80	526.680.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	120	225.000.000	120	247.500.000	240	472.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	120	254.000.000	120	279.400.000	240	533.400.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				0		0		0		
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42	85.973.400	42	94.570.700	84	180.544.100	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10	214.500.000	10	235.950.000	20	450.450.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	5	82.500.000	5	90.750.000	10	173.250.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	5	93.500.000	5	102.850.000	10	196.350.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	6	306.668.200	6	337.335.000	12	644.003.200	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5	209.022.000	5	229.924.200	10	438.946.200	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	14	547.201.400	14	601.921.600	28	1.149.123.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2	347.215.000	2	381.936.500	4	729.151.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	25	103.737.000	25	114.111.000	50	217.848.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2026		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2	225.000.000	2	247.500.000	4	472.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 unit kerja Dinas Pendidikan layak pakai	0 Persentasi	100	1.840.000.000	100	2.024.000.000	100	3.864.000.000		
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	250	165.000.000	250	181.500.000	500	346.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	20	350.000.000	20	385.000.000	40	735.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1	725.000.000	1	797.500.000	2	1.522.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	2	350.000.000	2	385.000.000	4	735.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Paket	1	250.000.000	1	275.000.000	2	525.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa rutin kantor	0 Paket	1	1.074.274.300	1	1.198.201.800	2	2.272.476.100		
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1	150.000.000	1	181.500.000	2	331.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42 Unit	42	616.904.500	42	678.595.000	42	1.295.499.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1	225.000.000	1	247.500.000	1	472.500.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1	82.369.800	1	90.606.800	2	172.976.600	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 Unit Kerja Dinas Pendidikan layak pakai	42 Unit	42	3.377.578.000	42	3.715.334.000	84	7.092.912.000		
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	427.551.000	0	470.306.000	0	897.857.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	62.392.000	0	68.631.000	0	131.023.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Paket	1	238.810.000	1	262.691.000	2	501.501.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42	2.048.825.000	42	2.253.706.000	84	4.302.531.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42	350.000.000	42	385.000.000	84	735.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	42	250.000.000	42	275.000.000	84	525.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	
					TOTAL PENDANAAN		**2.127.814.508.028**		**3.348.455.584.688**		**5.476.270.092.716**		

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (1-1.0-0.0-0.01.) Hal. 12 / 13

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

Untuk mencapai target tersebut dapat dilihat pada tabel indikator kinerja Dinas Pendidikan dibawah ini.

Tabel 7.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2025-2026 DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

VISI: TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG CERDAS DAN KOMPETITIF			
MISI 1:	**Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan	Pemerataan layanan pendidikan	Meningkatkan Perluasan jaminan akses dan fasilitasi layanan pendidikan formal maupun pendidikan non formal
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang pendidikan
		Sumberdaya sarana dan prasarana	Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan, meman -faatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Kualitas tatakelola manajeman pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	Peningkatan dan penguatan mutu pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan	Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Pelayanan Publik bidang pendidikan terhadap masyarakat

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2024-2026
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat				Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan merupakan unsur pendukung dalam penetapan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 2 unsur yaitu Angka RLS dan Angka HLS	$Indek\ Pendidikan = \frac{RLS1 + HLS1}{2}$	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	BPS	13,5	10,44	11	0	0	0	11	Indek Pendidikan merupakan untuk penghitung dalam penetapan capaian IPM yang terdiri dari 2 unsur indikator yaitu Angka RLS dan Angka HLS
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan			Persentase Angka Partisipasi Sekolah	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon	$APS = \frac{Jml.\ Siswa\ menurut\ usia\ sekolah\ tertentu\ yang\ bersekolah}{Jml.\ Penduduk\ Usia\ Sekolah\ tertentu} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil pendidikan Dinas Pendidikan dan Data Penduduk menurut Usia dari Disdukcapil / BPS	100	100	100	0	0	0	100	Angka Ideal APS jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Usia 7-15 tahun).
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase APK TK / PAUD	Untuk memahami data dan indikator yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan satu sasaran dalam pembangunan pendidikan	$APK = \frac{Jumlah\ siswa\ dijenjang\ pendidikan\ tertentu}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Data Penduduk Usia Sekolah dari Disdukcapil / BPS	70	70,3	72	0	0	0	72	Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah
				Persentase APK SD / Sederajat	Untuk memahami data dan indikator yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan satu sasaran dalam pembangunan pendidikan	$APK = \frac{Jml.\ Siswa\ dijenjang\ pendidikan\ tertentu\ ^{*)}}{Jml.\ Penduduk\ Kelompok\ Usia\ tertentu} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Data Penduduk Usia Sekolah dari Disdukcapil / BPS	100	100	100	0	0	0	100	Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah
				Persentase APK SMP / Sederajat	Untuk memahami data dan indikator yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan Perlauasan akses pendidikan yang biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan satu sasaran dalam pembangunan pendidikan.	$APK = \frac{Jml.\ Siswa\ pada\ jenjang\ pendidikan\ tertentu\ ^{*)}}{Jml.\ Penduduk\ kelompok\ Usia\ tertentu} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Data Penduduk Usia Sekolah dari Disdukcapil / BPS	100	100	100	0	0	0	100	Untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Persentase APM SD / Sederajat	Untuk memahami data dan indikator yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan Perlauasan akses pendidikan yang biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan satu sasaran dalam pembangunan pendidikan.	$APM = \frac{Jml.\ Siswa\ Kelompok\ Usia\ Sekolah\ Jenjang\ pendidikan\ tertentu\ *)}{Jml.\ Penduduk\ kelompok\ usia\ tertentu\ **)} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Profil Data Pendidikan Dinas Pendidikan dan Data Penduduk Usia Sekolah dari Disdukcapil / BPS	100	100	100	0	0	0	100	Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai.
				Persentase APM SMP / Sederajat	Untuk memahami data dan indikator yang terkait dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pemerataan dan Perlauasan akses pendidikan yang biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan satu sasaran dalam pembangunan pendidikan.	$APM = \frac{Jml.\ Siswa\ kelompok\ usia\ sekolah\ di\ jenjang\ pendidikan\ tertentu\ *)}{Jml.\ Penduduk\ kelompok\ usia\ tertentu\ **)} X 100$	Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil Pendidikan Dinas Pendidikan dan Data penduduk usia sekolah dari Disdukcapil/BPS	100	100	100	0	0	0	200	Untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai.
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru Telah Dibangun	Sekolah Baru yang Terbangun		Kumulatif		Unit		0	1	1	0	0	0	2	
		02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kebutuhan jamban siswa terhadap rasio siswa per sekolah		Kumulatif		Paket		160	386	386	0	0	0	772	Jamban Siswa yang dibangun
		02.2.01.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Memenuhi kebutuhan daya tampung siswa		Kumulatif		Paket		0	200	200	0	0	0	400	Paket pengadaan Meubelar Sekolah
		02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananaya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Kumulatif		Satuan Pendidikan		930	883	883	0	0	0	1.766	
		02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Kumulatif		Peserta Didik		0	215.607	215.607	0	0	0	431.214	
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Non Kumulatif		Peserta Didik		0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	
		02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS			Kumulatif		Satuan Pendidikan		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.0033.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Dilaksanakan Pemeliharaan			Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Kumulatif		Ruang		0	190	190	0	0	0	380	Ruang Kelas Baru pada Sekolah Dasar
				Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah			Kumulatif		Ruang		0	142	143	0	0	0	285	
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.			Kumulatif		siswa		200.000	205.000	210.000	0	0	0	415.000	Jumlah Siswa jenjang SMP
		02.2.02.0001.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pemerataan akses pendidikan		Kumulatif		Unit		0	1	1	0	0	0	2	Pembangunan Gedung Sekolah Baru untuk pemenuhan akses pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perluasan pelayanan dan aksebitas pendidika dasar		Kumulatif		Ruang		90.000	91.000	92.000	0	0	0	183.000	
				Jumlah Ruang kelas sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Mebel Sekolah yang Tersedia		Kumulatif		Persen		100	100	100	0	0	0	200	memenuhi daya tampung siswa
		02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Unit		80	90	100	0	0	0	190	
				Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah			Kumulatif		Paket		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kumulatif		Satuan Pendidikan		220	230	240	0	0	0	470	
		02.2.02.0044.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Ruang		30	30	50	0	0	0	80	
		02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama Mengelola Dana BOS			Kumulatif		Satuan Pendidikan		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.0044.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan		Kumulatif		Ruang		80	80	80	0	0	0	160	
		02.2.02.0055.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah sekolah yang terlayaninya dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Non Kumulatif		sekolah		0	130	130	0	0	0	130	
		02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah			Kumulatif		Ruang		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK/PAUD) terlayani kebutuhan penddikannya	Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui jenjang Pendidikan Pra Sekolah (TK/PAUD) terlayani kebutuhan penddikannya		Kumulatif		Siswa		65.000	7.000	73.000	0	0	0	80.000	Peserta Didik Pra Sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini)
		02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	50	100	0	0	0	150	
		02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Lokal		0	5	5	0	0	0	10	
		02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			Kumulatif		Unit		0	2	2	0	0	0	4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.03.0004.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Unit		0	2	2	0	0	0	4	
		02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	150	200	0	0	0	350	
		02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			Kumulatif		Satuan Pendidikan		700	800	825	0	0	0	1.625	
		02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Kumulatif		Orang		2.959	3.010	3.200	0	0	0	6.210	
		02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			Kumulatif		Peserta Didik		33.136	37.000	38.500	0	0	0	75.500	
		02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			Kumulatif		Satuan Pendidikan		750	760	795	0	0	0	1.555	
		02.2.03.0019.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			Kumulatif		Satuan Pendidikan		700	825	850	0	0	0	1.675	
		02.2.03.0011.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Kumulatif		Peserta Didik		0	1.400	1.450	0	0	0	2.850	
		02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	20	50	0	0	0	70	
		02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			Kumulatif		Orang		0	20	30	0	0	0	50	
		02.2.03.0025.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Kumulatif		Dokumen		1	2	2	0	0	0	4	
		02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	2	2	0	0	0	4	
		02.2.03.0026.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Sosialisasi tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan anak usia dini		Kumulatif		Satuan Pendidikan		0	800	850	0	0	0	1.650	
		02.2.03.0034.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			Kumulatif		Peserta didik		0	6.000	6.500	0	0	0	12.500	
		02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Kumulatif		Ruang		0	2	2	0	0	0	4	
		02.2.03.0035.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			Kumulatif		Buku		0	18.390	18.700	0	0	0	37.090	
		02.2.03.0037.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Non Kumulatif		Kegiatan		0	1	1	0	0	0	1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			Kumulatif		Paket		23.000	36.000	37.400	0	0	0	73.400	
		02.2.03.0040.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			Kumulatif		Unit		0	1	1	0	0	0	2	
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Persentase Capaian Angka Lulusan Siswa yang Bersekolah di Kabupaten Cirebon			Non Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	100	
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka jumlah lulusan siswa SD/MI	Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentasi	$AL = \frac{Jml.\ Lulusan\ pada\ jenjang\ pendidikan\ tertentu}{Jml.\ Siswa\ Tingkat\ Tertinggi\ pada\ jenjang\ pendidikan} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Data Profil Pendidikan Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	100	Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket A	Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentasi	$Presentase\ Lulusan\ Paket\ A = \frac{Jumlah\ Lulusan\ Warga\ Belajar\ Paket\ A}{Jumlah\ Warga\ Belajar\ tingkat\ tertinggi\ tahun\ sebelumnya} \times 100$	Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
				Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs	Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentasi	$Jumlah\ Lulusan = \frac{Jumlah\ Lulusan\ di\ jenjang\ pendidikan\ tertentu}{Jumlah\ Peserta\ didik\ tingkat\ tertinggi\ di\ tahun\ sebelumnya} \times 100$	Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket B	Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentasi		Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
				Angka jumlah Lulusan Warga BelajarPaket C	Perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentasi		Non Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	100	
		02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun		Kumulatif		Ruang		149	48	50	0	0	0	98	
		02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Penduduk siswa usia sekolah terlayani pendidikannya		Kumulatif		Unit		651	188	187	0	0	0	375	Ruang UKS pada SD
		02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	54	55	0	0	0	109	
		02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		0	120	120	0	0	0	240	Ruang Guru / Kepala Sekolah yang telah direhab

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		0	6	9	0	0	0	15	Ruang UKS yang direhab
		02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			Kumulatif		Paket		100	152	152	0	0	0	304	Paket perlengkapan sekolah penunjang KBM
		02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		50	170	170	0	0	0	340	Ruang perpustalkaan sekolah
		02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Kumulatif		Orang		0	400	400	0	0	0	800	
		02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			Kumulatif		Peserta Didik		0	250	250	0	0	0	500	
		02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Kumulatif		Persen		0	80	80	0	0	0	160	
		02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	40	40	0	0	0	80	
		02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Laboratorium yang Terbangun		Kumulatif		Ruang		0	152	152	0	0	0	304	
		02.2.01.0035.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Masih minimnya pengetahuan penggunaan peralatan TIK di sekolah dasar, terutama pada jenis perangkat chromebook		Kumulatif		Kegiatan		0	1	1	0	0	0	2	
		02.2.01.0042.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	KBM dapat ditunjang dengan kelengkapan sarana yang lengkap		Kumulatif		Paket		0	20	20	0	0	0	40	Perllengka[an TIK Penunjang KBM
		02.2.01.0045.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kebutuhan dasar buku pelajaran		Kumulatif		Buku		0	199.280	199.280	0	0	0	398.560	Buku Paket Pdelajaran
		02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			Kumulatif		Paket		2	1	1	0	0	0	2	
		02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terpenuhinya keebutuhan daya tampung siswa		Kumulatif		Paket		100	320	320	0	0	0	640	Uniit Ruang kelas yang terehab
		02.2.01.0049.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			Kumulatif		Kegiatan		0	250	250	0	0	0	500	
		02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		229	428	428	0	0	0	856	Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
		02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Kumulatif		Kegiatan		0	1.014	1.014	0	0	0	2.028	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Siswa yang bersekolah pada jenjang SMP dapat bersekolah danterlayani kebutuhan pendidikannya.			Kumulatif		siswa		200.000	205.000	210.000	0	0	0	415.000	Jumlah Siswa jenjang SMP
		02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	5	5	0	0	0	10	Ruangan untuk Kerja Guru dan Ruang Kerja Kepala Sekolah
		02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	20	20	0	0	0	40	
		02.2.02.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	5	5	0	0	0	10	Ruang Perpustakaan Sekolah
		02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang Lab. Sekolah untuk penunjang KBM		Kumulatif		Ruang		0	5	5	0	0	0	10	Ruang Laboratorium Sekolah
		02.2.02.0007.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang Serba Guna/Aula yang Tersedia		Kumulatif		Ruang		0	15	15	0	0	0	30	
		02.2.02.0010.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Keindahan dan kenyamanan Lingkungan gedung sekolah		Kumulatif		Unit		0	5	5	0	0	0	10	Pemagaran dan Halaman Upacara Sekolah
		02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			Kumulatif		Unit		85	85	85	0	0	0	170	
		02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Perpustakaan Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Ruang		25	25	25	0	0	0	50	
		02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Ruang		40	40	40	0	0	0	80	
		02.2.02.0016.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Ruang		0	20	25	0	0	0	45	
		02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Ajang Talenta Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik bagi Siswa SMP yang terselenggara	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Non Kumulatif		even Lomba		52	6	6	0	0	0	6	
		02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Kumulatif		Paket		1	1	1	0	0	0	2	
		02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima bantuan biaya personil			Non Kumulatif		Peserta Didik		0	500	500	0	0	0	500	
		02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kumulatif		Orang		520	620	720	0	0	0	1.340	
		02.2.02.0045.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Ruang		20	20	20	0	0	0	40	
		02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya layanan PPDB yang transparan, akuntabel, berkeladilan dan sesuai pedoman yang berlaku pada 80 SMP Negeri	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik		Non Kumulatif		Satuan Pendidikan		82.217	80	80	0	0	0	80	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		Kumulatif		Paket		2	2	2	0	0	0	4	
		02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat		Kumulatif		Ruang		85	85	85	0	0	0	170	
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang di Rehabilitasia			Kumulatif		Pintu		0	2	2	0	0	0	4	
		02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			Kumulatif		Unit		0	3	5	0	0	0	8	
		02.2.04.0018.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Kumulatif		Orang		0	80	85	0	0	0	165	
		02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			Kumulatif		Satuan Pendidikan		80	85	85	0	0	0	170	
		02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	2	3	0	0	0	5	
		02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Kumulatif		Orang		1.000	1.200	1.300	0	0	0	2.500	
		02.2.04.0021.	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan			Kumulatif		Unit		0	2	2	0	0	0	4	
		02.2.04.0024.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			Kumulatif		Orang		0	79	79	0	0	0	158	
		02.2.04.0027.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Kumulatif		Dokumen		0	79	79	0	0	0	158	
		02.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket A yang Tersedia			Non Kumulatif		Lembar		0	2.400	2.400	0	0	0	2.400	Penyediaan Cetak Buku Raport Paket A
		02.2.04.0038.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			Kumulatif		Ruang		0	2	0	0	0	0	2	
		02.2.04.0030.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			Kumulatif		Orang		0	156	224	0	0	0	380	
		02.2.04.0031.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			Kumulatif		Kegiatan		0	1	1	0	0	0	2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.04.0033.	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia			Kumulatif		Paket		0	1	1	0	0	0	2	
		02.2.04.0035.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			Kumulatif		Peserta Didik		0	400	400	0	0	0	800	
		02.2.04.0037.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik			Kumulatif		Buku		0	200	250	0	0	0	450	
		02.2.04.0039.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			Kumulatif		Ruang		0	3	4	0	0	0	7	
		02.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket B Tersedia	Penyediaan Pencetakan Buku Raport Paket B		Kumulatif		Lembar		0	20.000	30.000	0	0	0	50.000	
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Paket C yang Tersedia			Kumulatif		Lembar		0	36.000	36.000	0	0	0	72.000	Penyediaan Cetak Buku Raport Paket C
		02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			Kumulatif		Peserta Didik		7.000	7.500	8.000	0	0	0	15.500	
		02.2.04.0048.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			Kumulatif		Paket		0	3	4	0	0	0	7	
		02.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			Kumulatif		Unit		0	2	2	0	0	0	4	
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka jumlah lulusan Peserta Didik PAUD/TK/RA			Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
				Angka jumlah lulusan siswa SMP/MTs			Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket A			Kumulatif	Meningkat	Persen		50	60	70	0	0	0	130	
				Angka jumlah Lulusan Warga Belajar Paket B			Kumulatif	Meningkat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	
				Angka jumlah Lulusan Warga BelajarPaket C			Kumulatif	Meningkat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	
				Angka jumlah lulusan siswa SD/MI			Kumulatif	Meningkat	Persen		100	100	100	0	0	0	200	
		03.2.01.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah	Diperlukannya pelatihan kurikulum pendidikan, sehingga dapat diimplementasikan pada setiap pembelajaran di sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai		Non Kumulatif		Orang		0	400	400	0	0	0	400	
		03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			Kumulatif		Orang		0	400	400	0	0	0	800	
		03.2.01.0007.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Cirebon dan Bahasa Sumda Jenjang SMP			Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	
		03.2.01.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket A yang Tersusun			Kumulatif		Dokumen		0	10	10	0	0	0	20	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru Mulok yang meningkat kompetensinya dalam penyusunan dokumen kurikulum Mulok			Non Kumulatif		Orang		0	300	300	0	0	0	300	
		03.2.01.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket B yang Tersusun			Kumulatif		Dokumen		0	11	11	0	0	0	22	
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Paket C yang Tersusun			Kumulatif		Dokumen		0	12	12	0	0	0	24	
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Kumulatif		Persen		1	1	1	0	0	0	2	
		03.2.02.0002.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Kumulatif		Dokumen		2	2	2	0	0	0	4	
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Mengukur ketercapaian penyusunan dan penerapan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Non Kumulatif		Presentase		0	100	100	0	0	0	100	Mengukur ketercapaian penyusunan dan penerapan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		03.2.02.0006.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Tersusun			Non Kumulatif		Dokumen		1	1	1	0	0	0	1	
		03.2.02.0005.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			Non Kumulatif		Dokumen		1	1	1	0	0	0	1	
		03.2.02.0004.	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dinilai			Non Kumulatif		Buku		1	1	1	0	0	0	1	
		03.2.02.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia			Kumulatif		Buku		0	18.390	18.700	0	0	0	37.090	
		03.2.02.0005.	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Nonformal yang tersusun			Kumulatif		Dokumen		0	1	1	0	0	0	2	
		03.2.02.0006.	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Kumulatif		Dokumen		0	1	1	0	0	0	2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Agar tata kelola pendidikan berjalan dengan baik diperlukan adanya komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.		Kumulatif		Satuan Pendidikan		80	80	80	0	0	0	160	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SD			Kumulatif	Meningkat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	
				Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan bersertifikat pendidik jenjang SMP			Kumulatif	Meningkat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	
				Presentase Guru yang memilki kualifikasi S1/ D-IV dan rsertifikat pendidik jenjang PAUD			Kumulatif	Meningkat	Persen		0	0	0	0	0	0	0	
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagai dasar penempatan guru sesuai kualifikasi yang dimiliki	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik sebagai dasar penempatan guru sesuai kualifikasi yang dimiliki		Kumulatif		Dok		1	1	1	0	0	0	2	
		04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Non Kumulatif		Dokumen		0	1	1	0	0	0	1	
				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Kumulatif		Dokumen		1	1	1	0	0	0	2	
		04.2.01.0002.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Kumulatif		Dokumen		0	1	1	0	0	0	2	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Kumulatif		Dokumen		0	1	1	0	0	0	2	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Pelayanan Dasar Wajib Pengampu SPM		Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Capaian Indeks SPM Pendidikan Dasar			Kumulatif	Meningkat	Poin	Dinas Pendidikan dan Disdukcapil	100	100	100	0	0	0	200	Menerapkan layanan dasar pada bidang pendidikan
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Indeks Pelayanan	Manajeman Tatakelola Perkantoran dalam rangka peningkatan Standar Kepuasan Masyarakat	$Indeks\ Pelayanan = \frac{IKM\ TK + IKM\ SD + IKM\ SMP + Dinas\ Pendidikan\ Sesuai\ Tupoksi}{4}$	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Data SKM Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	100	Indeks Pelayanan merupakan nilai kinerja dalam penyelenggaran pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilal SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata rata tertimbang" masing masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama	$IKM = \frac{Jml.\ Total\ dari\ Persepsi\ Nilai\ per\ Unsur}{Total\ Nilai\ yang\ terisi} X\ Nilai\ Penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	SKM pada Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	100	Untuk menentukan Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan TK, SD, dan SMP serta IKM terkait Tupoksi yang ada pada Dinas Pendidikan
		01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan Anggaran sebagai dasar dalam oenetapan pelaksanaan kebijakan	Perencanaan dan Anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan kebijakan		Kumulatif		Dok		6	6	6	0	0	0	12	Dokumen penunjang dalam penyusunan perencanaan
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sebagai dasar dalam penyusun perencanaan dan penerapan kebiijakan		Kumulatif		Dokumen		6	6	6	0	0	0	12	Dokumen dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan
		01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kumulatif		Dokumen		8	8	8	0	0	0	16	
		01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebagai dasar dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Kumulatif		Dokumen		6	6	6	0	0	0	12	Dolkumen dasar dalam pelaksanaan anggaran kegiatan
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja Instansi Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat		Kumulatif		Laporan		3	3	3	0	0	0	6	Dokumen Laloran capaian kinerja
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar dalam penilaian terhadap kinerja perangkat daerah		Kumulatif		Dokumen		4	4	4	0	0	0	8	Dokumen Laporan hasil penilaian capaian kinerja
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan sebagai dasar dalam pengamblan kebijakan	Sebagai tolok ukur penilaian akuntabilitas instansi pemerintah		Kumulatif		Dok		5	5	5	0	0	0	10	Dokumen Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Administrasi Keuangan
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Non Kumulatif		Orang/bulan		9.536	9.631	9.727	0	0	0	9.727	Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk ASN setiap bulan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Untuk tertib administrasi dalam Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kumulatif		Dokumen		5	5	5	0	0	0	10	Dokumen laporan dan penatausahaan laporan keuangan
		01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sebagai laporan Akuntabiltas Keuangan SKPD		Kumulatif		Dokumen		3	3	3	0	0	0	6	Dokumen Laporan Pengellolaan Keuangan
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kumulatif		Laporan		2	0	2	0	0	0	2	Laporan Tahunan sebagai dokumen Laporan Keuangan Daerah
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kumulatif		Laporan		0	0	0	0	0	0	0	
		01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kumulatif		Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	
		01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terselenggaranya layanan tata kelola aset barang milik Pemerintah Daerah	Tertib admiinistrasi pengelolaan aset milik pemerintah		Kumulatif		Dok		2	2	2	0	0	0	4	Dokumen administrasi pengelolaan barang dan aset milik pemerintah
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kumulatif		Dokumen		15	18	18	0	0	0	36	
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pemenuhan biaya sewa tanah desa yang digunakan untuk bangunan sekolah		Non Kumulatif		Dokumen		15	15	15	0	0	0	15	Dokumen bukti sewa tanah dari kepala desa
		01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penataan dan pelaporan keadaan aser daerah		Non Kumulatif		Laporan		4	4	4	0	0	0	4	Laporan kondisi keadaan barang aset pemerintah
		01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertib adminstrasi		Non Kumulatif		Laporan		0	2	2	0	0	0	2	Laporan administrasi keadaaN barang milik daerah
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertib administrasi pengelolaan barang dan aset milik pemerintah		Kumulatif		Laporan		4	4	4	0	0	0	8	Dokumen laporan keadaan barang milik pemerintah
		01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kumulatif		Laporan		4	4	4	0	0	0	8	Laporan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah
		01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Kumulatif		Dokumen		2	2	2	0	0	0	4	
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket seragam pegawai dil ingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cirebon		Kumulatif		Paket		0	9.631	9.631	0	0	0	19.262	Pakaian seragam Dinas
		01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kumulatif		Unit		0	6	6	0	0	0	12	
		01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kumulatif		Dokumen		0	3	3	0	0	0	6	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kumulatif		Dokumen		0	4	4	0	0	0	8	
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kumulatif		Orang		0	40	40	0	0	0	80	
		01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kumulatif		Orang		0	120	120	0	0	0	240	
		01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kumulatif		Orang		0	120	120	0	0	0	240	
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Paket		42	42	42	0	0	0	84	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	10	10	0	0	0	20	
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	5	5	0	0	0	10	
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	5	5	0	0	0	10	Bahan peralatan dan kelengkapan kantor
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Kumulatif		Paket		5	6	6	0	0	0	12	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Kumulatif		Dokumen		0	5	5	0	0	0	10	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Kumulatif		Paket		12	14	14	0	0	0	28	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kumulatif		Laporan		2	2	2	0	0	0	4	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kumulatif		Laporan		0	25	25	0	0	0	50	Penyediaan Biaya Transportasi dan Akomodasi Perdin Pejabat Eselon II dan III
		01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kumulatif		Dokumen		0	2	2	0	0	0	4	
		01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 unit kerja Dinas Pendidikan layak pakai			Non Kumulatif		Persentasi		0	100	100	0	0	0	100	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Unit		0	20	20	0	0	0	40	
		01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Unit		0	1	1	0	0	0	2	Gedung UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Cirebon
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Kumulatif		Unit		0	250	250	0	0	0	500	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	2	2	0	0	0	4	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Paket		0	1	1	0	0	0	2	Sarana Penunjang kegiatan perkantoran
		01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa rutin kantor			Kumulatif		Paket		0	1	1	0	0	0	2	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Non Kumulatif		Unit		42	42	42	0	0	0	42	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di 42 Unit Kerja Dinas Pendidikan
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Laporan		0	1	1	0	0	0	2	
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kumulatif		Laporan		0	1	1	0	0	0	2	
		01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Non Kumulatif		Paket		0	1	1	0	0	0	1	
		01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah pada 42 Unit Kerja Dinas Pendidikan layak pakai			Kumulatif		Unit		42	42	42	0	0	0	84	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kumulatif		Paket		0	1	1	0	0	0	2	
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	0	0	
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kumulatif		Unit		0	0	0	0	0	0	0	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kumulatif		Unit		42	42	42	0	0	0	84	
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kumulatif		Unit		42	42	42	0	0	0	84	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara dan terawat
		01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kumulatif		Unit		42	42	42	0	0	0	84	42 unit kerja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan dalam keragka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026.

Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di wilayah Kabupaten Cirebon.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan serta digunakan sebagai bahan rancangan penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelengaraan bidang/urusan Dinas Pendidikan dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan yang telah dijabarkan dalam dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) itu akan menjadi bukti *(prove)* pecapaian kinerja dan bahkan perbaikan *(improving)* pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci suskes dan keberhasilan pencapaian target kinerja Resntra Dinas Pendidikan ini.

7.1 KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan merupakan arah untuk mewujudkan suatu komitmen dari seluruh pengelola dan pemerhati pendidikan dalam merealisasikan cita-cita masyarakat Kabupaten Cirebon seperti yang tercantum dalam VISI dan MISI yang diimplementasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2025 - 2026.

Jika Renstra dapat dilaksanakan sesuai tahapannya, maka akan terjadi peningkatan IPM masyarakat Kabupaten Cirebon, hal ini menggambarkan tingkat kemampuan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga diharapkan dapat bersaing dalam era global yang penuh kompetisi dan tantangan.

7.2 SARAN

Untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu :

1. Adanya kesadaran dan kemauan dari seluruh jajaran pendidikan mulai dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memahami dengan baik konsep-konsep yang tersurat maupun tersirat di dalam visi dan misi yang telah disepakati bersama
2. Adanya komitmen seluruh jajaran untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian IPM 76,74 di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026.
3. Adanya konsistensi untuk senantiasa beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, dalam arti mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negative
4. Optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan memobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan

Diharapkan rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026.

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,